

**PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT,  
KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN KOMPENSASI  
DEWAN TERHADAP KOMITE MANAJEMEN RISIKO  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Non *Financial* yang Terdaftar di BEI Tahun  
2010-2012)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**VIANIKA HERLANTU**

**NIM. 12030110120035**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2014**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Vianika Herlantu  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120035  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE  
AUDIT, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN  
DAN KOMPENSASI DEWAN TERHADAP  
KOMITE MANAJEMEN RISIKO**  
Dosen Pembimbing : Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt

Semarang, 9 Juni 2014

Dosen Pembimbing,

(Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt)

NIP. 19670814 199802 2001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Vianika Herlantu  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120035  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi  
JudulSkripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE  
AUDIT, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN  
KOMPENSASI DEWAN TERHADAP KOMITE  
MANAJEMEN RISIKO**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 24 Juni 2014**

Tim Penguji:

1. ....(.....)
2. ....(.....)
3. ....(.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini saya, Vianika Herlantu, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Karakteristik Perusahaan, dan Kompensasi Dewan terhadap Komite Manajemen Risiko** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 5 Juni 2014  
Yang membuat pernyataan

(Vianika Herlantu)  
NIM: 12030110120035

## **ABSTRACT**

*This study aimed to examine the association between Audit Committee characteristics, firm characteristics, compensation of Board to the Risk Management Committee. Risk Management Committee is the existence of RMC in the company, whether incorporated in or separate from the audit committee and independent Audit Committee. The variables examined in this study are the characteristics of an Audit Committee comprised of independent Audit Committees, accounting and financial expertise of the Audit Committee, Audit Committee size , the frequency of Audit Committee meetings, as an independent variable. In addition, the independent variables representing the characteristics of the company is the risk of financial reports and other independent variable is the compensation of the Board. Factors such as firm size, leverage, complexity of firm, and auditor reputation as a control variable is also examined in this study .*

*This study used purposive sampling method to non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010 until 2012. Logistic regression was used as a test of the hypothesis in this study and there are 291 samples used non-financial companies .*

*The results of this study indicate that the size and frequency of meetings of the Audit Committee significantly and positively related to the Risk Management Committee incorporated or separately with the Audit Committee, while the independence of the Audit Committee, the accounting and financial expertise of the Audit Committee, the risk of the financial statements, the compensation Board and all the control variables no significant effect on the Risk Management Committee incorporated or separately with the Audit Committee.*

**Keywords:** *Risk Management Committee, Audit Committee, Firm Characteristics, and compensation Board*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik Komite Audit, karakteristik perusahaan, kompensasi Dewan terhadap Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko yang dimaksud adalah Komite Manajemen Risiko di dalam perusahaan, apakah tergabung dengan komite audit atau terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri. Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah karakteristik komite audit yang terdiri dari, keahlian akuntansi dan keuangan komite audit, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, sebagai variabel independen. Selain itu, variabel independen yang mewakili karakteristik perusahaan adalah risiko pelaporan keuangan dan variabel independen lainnya adalah kompensasi Dewan. Faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, *leverage*, kompleksitas perusahaan, dan reputasi auditor sebagai variabel kontrol juga diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* terhadap perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 sampai 2012. *Regresi Logistic* digunakan sebagai alat uji hipotesis dalam penelitian ini dan sampel yang digunakan ada 288 perusahaan non finansial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran Komite Audit dan frekuensi rapat Komite Audit berhubungan positif dan signifikan terhadap Komite Manajemen Risiko tergabung atau terpisah dengan Komite Audit, sedangkan independensi Komite Audit, keahlian akuntansi dan keuangan Komite Audit, risiko laporan keuangan, kompensasi dewan dan semua variabel kontrol tidak berpengaruh signifikan terhadap Komite Manajemen Risiko tergabung atau terpisah dengan Komite Audit.

**Kata Kunci:** Komite Manajemen Risiko, Komite Audit, karakteristik perusahaan, dan kompensasi Dewan.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *-MOTTO-*

Man Jadda Wa Jada

“siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil”

(Peribahasa Arab)

Doa bukan ‘ban serep’ yang dikeluarkan saat dalam masalah, tapi doa adalah ‘roda utama’ yang akan membawa kita sampai ke tujuan’

(Rangga Umara)

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu

(surat Al-Baqarah ayat 45)

### *-PERSEMBAHAN-*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

- ♥ Allah SWT atas karunia dan ridhonya
- ♥ Bapak, Ibu, Kakak dan Adek tercinta yang telah memberi doa dan dukungan
- ♥ Sahabat – sahabatku atas bantuan, doa, dan motivasi
- ♥ Teman-teman seperjuangan akuntansi 2010

## KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yangsenantiasaa memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya,sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Karakteristik Perusahaan, dan Kompensasi Dewan terhadap Komite Manajemen Risiko” dapat diselesai dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak baik itu doa, semangat, pengalaman, dan bimbingan yang sudah diberikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D, selaku DekanFakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
3. Ibu Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt selaku dosen pembimbing dan dosen wali dengan kesabaran dan keramahannya, penulis berterima kasih beliau sudah meluangkan waktu utuk memberikan doa, bimbingan, saran, motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, khususnya Dosen Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang berharga bagi penulis.
5. Seluruh staf di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang sudah membantu selama kuliah.
6. Ayah dan Ibu yang tersayang, Bapak Suhanadi dan Ibu Mulyani yang sudah memberikan doa yang begitu tulus, motivasi untuk selalu semangat, dan kemudahan baik itu secara moral maupun materil. Semoga penulis dapat menjadi anak yang sholehah dan membahagiakan orang tuanya.
7. Uwak Jujun yang penulis hormati dan teladani.
8. Adik-adikku yang lucu dan tersayang, Dwinta dan Verdi yang selalu mendoakan dan memberikan semangat agar kakaknya dapat sukses dalam hal apapun.
9. Saudara-saudara yang selalu memberikan semangat: mba Teni, mba Kanti, Tia, om Sudar, dan Bi Linda.
10. Sahabat-sahabatku: Nanik, Vina, Nisa, Desi, Elke, Ashri, Niswa dan Widya, adik kosku yang sudah menginspirasi, memotivasi, sebagai tempat curhat di kala senang dan sedih, selalu menghibur untuk membuat tertawa dan tersenyum dan saling mendoakan yang terbaik.
11. Teman-teman KKN Desa Brayu Kecamatan Wonotunggal yang unik, aneh, dan lucu, mba naina, mba Virsa, Khusnul, Kikis, Nanik, Uud, mas Andro, dan mas Rendika.
12. Teman-teman KSEI, mba rosmi, mba siska, mba nibras, alfi, igha, rina, nina, dan yang lainnya.

13. Ummi, Essy, Murni, Annisaul, Rani, Niken, dan seluruh teman-teman Akuntansi 2010 yang belajar dan berjuang bersama di FEB UNDIP. Semoga kita semuanya sukses.
14. Teman-teman liqo dan ESQ 165 : Selia dan Anggy yang sudah menginspirasi dan berbagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
15. Teman-Teman CITIRENG: Nanik, Nisa, dan Eta yang selama kurang lebih satu tahun memberikan kesempatan untuk bisa belajar berbisnis bersama.
16. Kakak angkatan yang sudah banyak membantu berbagi ilmu dan pengalaman : mba Mona, mba Yulia, mba Jane, mba Wulan, mba Assa, mas Chandra, mas hasmi, mas Ikhsan dan Kak nova, dan Kak Nugie.
17. Teman-teman bimbingan Bu Andri: Thia, Danti, dan Nuzul yang senantiasa berjuang bersama tak kenal lelah untuk selalu semangat dan sabar mengerjakan skripsi. Terima kasih untuk kebersamaan dan bantuannya.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang sudah membantu kelancaran skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengalaman, pengetahuan, dan waktu penulis. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 5 Juni 2014

Penulis

Vianika Herlantu

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	11
2.1.2 <i>Good Corporate Governance</i> .....	12
2.1.3 Manajemen Risiko.....	14
2.1.4 Perkembangan Manajemen Risiko.....	15
2.1.5 Komite Manajemen Risiko.....	17
2.1.6 Tujuan Manajemen Risiko.....	21

2.1.7	Peraturan Manajemen Risiko .....	22
2.1.7.1	COSO .....	22
2.1.7.2	ISO 31000 .....	23
2.1.8	Audit Berbasis Risiko .....	24
2.1.9	Karakteristik Komite Audit.....	26
2.1.9.1	Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit..	26
2.1.9.2	Ukuran Komite Audit .....	28
2.1.9.3	Frekuensi Rapat Komite Audit .....	28
2.1.10	Karakteristik Perusahaan.....	29
2.1.10.1	Risiko Pelaporan Keuangan.....	29
2.1.11	Kompensasi Dewan.....	30
2.2	Penelitian Terdahulu .....	31
2.3	Kerangka Pemikiran .....	35
2.4	Hipotesis .....	36
2.4.1	Pengaruh Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit terhadap <i>Risk Management Committee (RMC)</i> .....	36
2.4.2	Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap <i>Risk Management Committee (RMC)</i> .....	38
2.4.3	Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap <i>Risk Management Committee (RMC)</i> .....	39
2.4.4	Pengaruh Risiko Pelaporan Keuangan terhadap <i>Risk Management Committee (RMC)</i> .....	40
2.4.5	Pengaruh Kompensasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris berpengaruh terhadap <i>Risk Management Committee (RMC)</i>	41
BAB III METODE PENELITIAN.....		43
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	43
3.1.1	Variabel Dependen.....	43
3.1.2	Variabel Independen .....	45
3.1.3	Variabel Kontrol .....	47

3.2	Populasi dan Sampel.....	50
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	52
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	52
3.5	Metode Analisis .....	53
3.5.1	Analisis Deskripsi Variabel Penelitian .....	53
3.5.2	Persamaan <i>Logistic Regression</i> .....	53
3.5.2.1	Uji kelayakan model ( <i>Goodness of fit</i> ) .....	55
3.5.2.2	Uji Kelayakan Keseluruhan Model ( <i>Overall Fit. Model Test</i> ).....	55
3.5.2.2.1.	<i>Cox and Snell's R Square</i> dan <i>Nagelkerke's R Square</i> .....	55
3.5.2.2.2.	Model Klasifikasi .....	56
3.5.2.3	Uji Hipotesis .....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....		58
4.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	58
4.2	Hasil Data <i>Outlier</i> .....	59
4.3	Analisis Data.....	60
4.3.1	Hasil Deskripsi Variabel Penelitian .....	60
4.3.2	Hasil Pengujian Kelayakan Model ( <i>Goodness of Fit</i> ) .....	62
4.3.2.1	Uji <i>Hosmer and Lemeshow</i> .....	62
4.3.3	Pengujian Kelayakan Keseluruhan Model ( <i>Overall Fit Model Test</i> ).....	64
4.3.3.1	Hasil <i>Cox and Snell's R Square</i> dan <i>Nagelkerke's R Square</i> .....	65
4.3.3.2	Hasil Model Klasifikasi .....	66
4.4	Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik.....	68
4.4.1.	Pengaruh Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit terhadap RMC.....	69

4.4.2. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap RMC.....	70
4.4.3. Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap RMC.....	70
4.4.4. Pengaruh Risiko Pelaporan Keuangan terhadap RMC .....	70
4.4.5. Pengaruh Kompensasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap RMC.....	70
4.4.6. Variabel Kontrol .....	70
4.5 Pembahasan .....	72
4.5.1. Pengaruh Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit terhadap RMC.....	72
4.5.2. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap RMC.....	72
4.5.3. Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadapSRMC ....	73
4.5.4. Pengaruh Risiko Pelaporan Keuangan terhadapSRMC .....	74
4.5.5. Pengaruh Kompensasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap RMC.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
5.1 Kesimpulan .....	78
5.2 Keterbatasan .....	79
5.3 Saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Perbedaan Komite Audit dan RMC .....	20
Tabel 2.3	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 2.4	Kerangka Pemikiran.....	36
Tabel 3.1	Ringkasan Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	50
Tabel 4.1	Proses Seleksi Sampel dengan Kriteria .....	58
Tabel 4.2	Hasil Data <i>Outlier</i> .....	59
Tabel 4.3	Hasil Deskripsi Variabel Penelitian .....	60
Tabel 4.4	Hasil Model Klasifikasi.....	67
Tabel 4.5	Hasil Model Klasifikasi <sup>1</sup> .....	68
Tabel 4.6	Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik .....	69
Tabel 4.7	Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis .....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Organisasi pada tingkat <i>corporate governance</i> .....	17
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran .....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Daftar Perusahaan Sampel Penelitian.....	86
Lampiran B	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	91
Lampiran C	Hasil Regresi Logistik.....	96

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Krisis moneter pada tahun 1997 pernah melanda Negara Asia yaitu Negara Indonesia yang mempengaruhi perekonomian menjadi tidak stabil. Banyak perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan karena krisis tersebut. Selain itu pada tahun 2001 disusul oleh kasus kebangkrutan yang dialami Enron dan Worldcom yang baru-baru ini terjadi di luar Negara Indonesia yaitu Amerika. Skandal ini diduga terjadi karena adanya kolusi antara auditor, penasihat pajak, pengacara, banker, dan mitra bisnisnya untuk merevisi laporan keuangan demi keuntungan jangka pendek para manajer yang mengabaikan kepercayaan yang telah diberikan oleh pemegang saham (Hery, 2013:60). Kebangkrutan Enron disebabkan oleh konflik kepentingan, rekayasa laporan keuangan, dan kurangnya pengawasan dari manajemen (Li, 2010).

Beberapa isu yang berkembang adalah lemahnya praktik GCG. Tuntutan terhadap wujud GCG di setiap sektor sangat wajar mengingat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa krisis ekonomi disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) oleh pelaku ekonomi (Zarkasyi, 2008:8). Hal ini mendorong penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) khususnya pada manajemen risiko untuk melindungi korporasi dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No.: PER-

01/MBU/2011, Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG sehingga penerapan manajemen risiko yang baik membutuhkan sistem yang formal dan terintegrasi.

Sebuah sistem manajemen risiko yang efektif dipandang membantu organisasi mencapai tujuan usahanya, meningkatkan pelaporan keuangan serta menjaga reputasinya (Subramaniam, *at al.*, 2009). Oleh karena itu perusahaan membutuhkan mekanisme formal untuk mengelola risiko dan mengantisipasi risiko di masa yang akan datang. Implementasi sistem manajemen risiko perusahaan (ERM) akan meningkatkan kinerja perusahaan (Widjaya dan Sugiarti, 2013).

Keberadaan komite-komite pengawas seperti Komite Audit ini merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Indriani dan Nurkholis, 2002). Secara umum tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaporan keuangan perusahaan, audit eksternal, audit internal, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan pasar modal dan peraturan lainnya. Selain itu, Komite Audit juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap risiko-risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi serta menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, dan manajemen risiko Emiten dan Perusahaan Publik. Hal ini tertera dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 dan Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012

tertanggal 7 Desember 2012. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit tersebut sebaiknya didukung dengan keahlian akuntansi dan keuangan khususnya pengetahuan mengenai manajemen risiko agar Komite Audit mampu melaksanakan peran mereka dalam melakukan *risk oversight* secara efektif dan dengan keahlian akuntansi dan keuangan tersebut diharapkan anggota Komite Audit sadar risiko perusahaan sehingga mendorong untuk membentuk Komite Manajemen Risiko. Selain itu, tidak hanya keahlian yang dibutuhkan tetapi faktor jumlah anggota Komite Audit pada setiap perusahaan dapat mempengaruhi informasi dalam *risk oversight* dan ditambah dengan tanggung jawab mereka untuk sering melakukan pertemuan atau rapat dapat mempengaruhi keputusan tentang risiko potensial yang dialami perusahaan sehingga anggota Komite Audit dapat memberikan kontribusi dalam memastikan praktik ERM yang komprehensif dengan membentuk Komite Manajemen Risiko di perusahaan.

Disamping itu, ada pertentangan pendapat mengenai keterlibatan Komite Audit dengan tugasnya yang berhubungan dengan manajemen risiko. Komite Audit menjadi semakin terlibat dalam manajemen risiko tetapi terdapat sejumlah keraguan apakah Komite Audit dapat melakukan manajemen risiko secara efektif terkait dengan kurangnya keahlian dan waktu (Yatim, 2009). Menurut Edward Hida yang menjabat sebagai pemimpin global untuk *Risk & Capital Management Deloitte & Touche* LLP berlatih dalam praktek Industri Jasa Keuangan berpendapat bahwa Komite Audit inheren didorong oleh persyaratan jadwal dan pelaporan keuangan maka sebagai akibatnya mereka cenderung berfokus pada risiko yang berkaitan

dengan integritas laporan keuangan. Komite Audit mungkin kurang mengalami pengalaman manajemen risiko yang cukup yang dapat menyebabkan anggota komite tersebut mengabaikan beberapa risiko. Dengan adanya berbagai pertimbangan dan semakin kompleksnya mekanisme suatu pengawasan dan manajemen risiko yang dilakukan oleh Komite Audit, maka banyak perusahaan berusaha membuat suatu sistem baru dan membentuk suatu Komite Pengawasan Risiko yang terpisah dari Komite Audit yaitu bernama Komite Manajemen Risiko, atau disebut dengan *Risk Management Committee* (RMC) (Sambera, 2013).

Keberadaan Komite Manajemen Risiko yang terpisah dari Komite Audit pada sebagian perusahaan dipandang sebagai alternatif yang baik dalam mengatasi tugas pengawasan manajemen risiko yang dibebankan pada Komite Audit. RMC yang terpisah tersebut dapat memberikan nilai pada perusahaan antara lain meningkatkan pengawasan risiko ke tingkat tertinggi dalam perusahaan, memperkuat kualitas manajemen risiko, menanamkan lingkungan budaya risiko dan manajemen risiko untuk mengurangi dan mengelola risiko secara efektif di seluruh organisasi, membangun platform untuk penilaian risiko berkelanjutan dalam lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan Komite Manajemen Risiko yang terpisah dari Komite Audit dalam perusahaan memberikan fungsi pengawasan manajemen risiko yang lebih baik dan efisien dibandingkan dengan RMC yang tergabung atau terintegrasi dengan Komite Audit (Collier, 1993; Ruigrok *et al*, 2006; Turpin dan DeZoort, 1998 dalam Ratnawati, 2012).

Pembentukan Komite Manajemen Risiko di Indonesia mulai mengalami perkembangan yang signifikan, seiring dengan diwajibkan membentuk Komite Manajemen Risiko di sektor perbankan yang diterapkan secara menyeluruh mengikuti Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003. Sekarang ini tidak hanya industri perbankan saja yang membentuk Komite Manajemen Risiko tetapi industri lain juga mulai mengikuti perkembangan tersebut walaupun pembentukan Komite Manajemen Risiko yang terpisah dari Komite Audit pada perusahaan *non financial* masih rendah dimana jumlah Komite Manajemen Risiko pada perusahaan *non financial* yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012 pada penelitian yang akan dilakukan sebesar 51 perusahaan karena masih bersifat sukarela dan belum ada peraturan yang mengaturnya

Sebuah sistem manajemen risiko yang efektif dapat membantu perusahaan mencapai tujuan usaha yaitu meningkatkan pelaporan keuangan dan menjaga reputasi perusahaan (Purbawati. 2011). Kualitas pelaporan keuangan tidak terlepas dari risiko kesalahan yang dilakukan manajemen maka dengan dibentuknya Komite Manajemen Risiko yang berdiri sendiri sebagai bentuk pengawasan yang efektif dalam mengurangi potensi kesalahan yang mengacu pada rekayasa pelaporan keuangan. Oleh sebab itu, beberapa penelitian yang dilakukan Subramaniam, *et al.*, (2009), Sambera (2013), Andarini dan Januarti (2010), Ratnawati (2012), Diani (2013), dan Puspaningrum (2013) tidak hanya mengkaitkan faktor-faktor karakteristik

Dewan Komisaris saja tetapi Karakteristik perusahaan seperti risiko pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi *Risk Management Committee*.

Subramaniam, *et al.*, (2009) menguji pengaruh risiko pelaporan keuangan terhadap keberadaan RMC menemukan hubungan positif dan signifikan antara risiko pelaporan terhadap RMC yang terpisah dari Komite Audit. Hasil yang sama juga dikemukakan oleh Sambera (2013) yang menguji tentang pengaruh risiko pelaporan keuangan juga berpengaruh positif signifikan terhadap RMC yang terpisah. Namun pendapat lain dikemukakan oleh Andarini dan Januarti (2010), Ratnawati (2012), Diani (2013), dan Puspaningrum (2013) bahwa variabel risiko pelaporan keuangan tidak berhubungan signifikan terhadap RMC yang terpisah dari Komite Audit. Alasan yang mungkin mendasari adalah Komite Audit dan auditor internal perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding RMC dalam memastikan informasi keuangan perusahaan yang telah disajikan sesuai dengan prinsip yang berlaku (Andarini dan Januarti, 2010).

Penelitian Yatim (2009) yang menganalisis hubungan antara karakteristik Komite Audit terhadap pembentukan Komite Manajemen Risiko dijadikan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Ada beberapa perbedaan variabel antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian Yatim (2009). Perbedaannya adalah dengan menambahkan variabel risiko pelaporan keuangan sebagai bagian dari karakteristik perusahaan yang memiliki hasil yang bervariasi pada penelitian-penelitian sebelumnya. Disamping itu dengan menambahkan variabel baru yaitu

kompensasi Dewan yang mempunyai pengaruh juga dalam mengatasi konflik keagenan. Peraturan mengenai penetapan kompensasi atau penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas terdapat pada Peraturan Menteri Negara BUMN RI Nomor: PER-02/MBU/2009. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengambil sampel yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan, dimana penelitian Yatim (2009) menggunakan perusahaan *non financial* di Malaysia pada tahun 2003 sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan sampel perusahaan *non financial* di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2012. Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Karakteristik Perusahaan dan Kompensasi Dewan Terhadap Komite Manajemen Risiko”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Peranan Komite Audit dalam pengawasan terhadap pelaporan keuangan terutama untuk kepentingan para *stakeholder* menjadi kebutuhan yang penting untuk pengambilan keputusan terutama dalam pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko. Peninjauan dan pengelolaan atas manajemen risiko oleh Komite Audit dapat memberikan nilai tambah dan risiko yang dihadapi pada semua level di organisasi dapat dipahami untuk dianalisis sehingga risiko dapat diminimalisir sekecil mungkin melalui tindakan yang efektif. Berdasarkan penjelasan yang sudah

dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah-masalah tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah keahlian akuntansi dan keuangan Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Risk Management Committee (RMC)*?
2. Apakah ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Risk Management Committee (RMC)*?
3. Apakah frekuensi rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Risk Management Committee (RMC)*?
4. Apakah risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap *Risk Management Committee (RMC)*?
5. Apakah kompensasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Risk Management Committee (RMC)*?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang dijabarkan diatas yang mencerminkan ruang lingkup, metode yang digunakan dan hasil yang diharapkan. Beberapa tujuan yang terkait dengan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bukti empiris bahwa keahlian akuntansi dan keuangan Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Risk Management Committee (RMC)*?
2. Memberikan bukti empiris bahwa ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Risk Management Committee (RMC)*?

3. Memberikan bukti empiris bahwa frekuensi rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Risk Management Committee* (RMC)?
4. Memberikan bukti empiris bahwa risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap *Risk Management Committee* (RMC).
5. Memberikan bukti empiris bahwa kompensasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Risk Management Committee* (RMC).

Adapun hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi akademis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi terutama bagaimana karakteristik Komite Audit, karakteristik perusahaan dan kompensasi Dewan mempengaruhi *Risk Management Committee* (RMC) di perusahaan *non financial* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagi praktisi bisnis, memberikan pemahaman tentang adanya RMC di perusahaan yang dapat meningkatkan kualitas *corporate governance*, khususnya pengawasan manajemen risiko sehingga dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika usulan penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan yang disusun yang terdiri dari 5 bab. Bab I adalah pendahuaan yang

berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. BAB II adalah tinjauan pustaka yang menjelaskan landasan teori untuk melandasi penelitian yang mencangkup teori agensi, *Good Corporate Governance* (GCG), manajemen risiko, Komite Manajemen Risiko, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. BAB III adalah metode penelitian yang berisi variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis sampel. BAB IV adalah hasil dan pembahasan yang menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian atau pembahasan. BAB V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Di bab dua ini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka penelitian. Untuk mendukung penetapan masalah penelitian dan pembahasan yang akan diungkapkan dengan baik, maka diperlukan tinjauan pustaka, sebab tinjauan pustaka akan mendasari dan mempertajam penguasaan teori yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

#### **2.1. Landasan Teori**

Dalam landasan teori ini dijabarkan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis serta membantu dalam analisis hasil penelitian. Landasan teori merupakan penjabaran teori dan argumentasi yang disusun sendiri oleh penulis sebagai tuntunan dalam memecahkan masalah penelitian serta perumusan hipotesis.

##### **2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan dijadikan sebagai dasar dalam penelitian ini. Menurut Jensen dan Meckling (1976), dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut.

Masalah agensi antara pemegang saham dan manajemen biasanya muncul dari kombinasi asimetri informasi dan perbedaan dalam sensitivitas terhadap risiko

spesifik perusahaan. Di sini istilah "sensitivitas terhadap risiko spesifik perusahaan" adalah digunakan untuk merujuk bagaimana pembuat keputusan membuat peringkat alternatif yang berbeda dalam menilai risiko (Islam, *et al.*, 2010). Ini menandakan ketidakseimbangan dan cepat berubahnya suatu informasi yang didapat oleh pihak pemegang saham dimana selaku manajer lebih banyak memperoleh informasi mengenai input dan output perusahaan sehingga kedua pihak ini mempunyai keputusan yang berbeda dalam menilai risiko. Manajer mencoba menyeleksi pilihan dengan risiko dan ketidakpastian paling sedikit dan kemungkinan pihak pemegang saham berusaha juga untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan cara mereka sendiri. Permasalahan *principal-agent* dapat diatasi atau dikurangi dengan institusi yang menetapkan pengawasan efektif atau mekanisme *feedback* yang mana dapat membuat kinerja dan hasil yang dicapai lebih transparan dan terukur.

### **2.1.2. Good Corporate Governance**

Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 pernah mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001 dan yang terbaru adalah tahun 2006 yang merupakan revisi pedoman tahun 2001 maka diterbitkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh KNKCG dalam kerangka dorongan etika. Pedoman ini dijadikan acuan untuk melaksanakan sistem tata kelola yang baik bagi dunia usaha untuk keberlangsungan usaha tetapi sifatnya masih bersifat sukarela.

Bapepam-LK mengadopsi pedoman tersebut ke dalam peraturan-peraturan Bapepam-LK yang sifatnya *mandatory* seperti kewajiban pembentukan Komite Audit dan keberadaan Komisaris independen dalam perusahaan. Dengan begitu Bapepam-LK dapat memberikan sanksi jika perusahaan tidak menerapkan peraturan tersebut. Bapepam-LK juga mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk mengungkapkan pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan seperti frekuensi rapat Dewan Komisaris dan Direksi, frekuensi kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat tersebut, frekuensi rapat dan kehadiran Komite Audit, pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi serta remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

*Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, Dewan Komisaris, para pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan yaitu *stakeholders*. Ada beberapa mekanisme yang sering dipakai dalam berbagai penelitian mengenai *Good Corporate Governance* diantaranya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi Dewan Komisaris independen dan Komite Audit (Sari dan Riduwan, 2013).

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk

mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (Zarkasyi, 2008:39). Perusahaan diharapkan dapat mengimplementasikan praktik GCG ini misalnya dengan melakukan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dan andal, melakukan sosialisasi dan internalisasi penerapan GCG di setiap perusahaan serta memberlakukan penerapan manajemen risiko di seluruh lini kegiatan usaha perusahaan.

### **2.1.3. Manajemen Risiko**

*The Institute Of Internal Auditors* mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu proses untuk mengidentifikasi, mengakses, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi yang dapat menjadi risiko, untuk menambah kepastian tercapainya tujuan organisasi.

Dalam *Australian/New Zealand Standard on Risk Management AS/NZS 4360* mendefinisikan manajemen risiko sebagai (Tunggal, 2013:28):

*“An iterative process consisting of steps, which when taken in sequence enable continual improvement in decision making. It is the logical and systematic method of identifying, analyzing, evaluating, treating, monitoring, and communicating risk associated with any activity, function or process in a way that will enable organizations to minimize lossess and maximize opportunities.”*

Manajemen risiko juga diartikan sebagai kemampuan seorang manajer untuk menata kemungkinan variabilitas pendapatan dengan menekan sekecil mungkin tingkat kerugian yang diakibatkan oleh keputusan yang diambil dalam menggarap situasi yang tidak pasti (Sofyan, 2005:2). Secara garis besar, beberapa pengertian mengenai manajemen risiko memiliki definisi yang hampir sama dimana perusahaan

berusaha untuk meminimalkan risiko yang terkadang memiliki ketidakpastian melalui beberapa tahap atau proses tertentu yang dilakukan oleh fungsi manajemen sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

#### **2.1.4. Perkembangan Manajemen Risiko**

Manajemen risiko mengalami proses evolusi dimulai dari manajemen risiko tradisional ke arah manajemen risiko modern. Pertama kali istilah manajemen risiko sudah lama dikenal setelah perang dunia II. Setelah Perang Dunia II, perusahaan besar dengan beragam portofolio aset fisik portofolio mulai mengembangkan asuransi diri terhadap risiko sebagai bentuk perlindungan diri. Berawal dari tahun 1950 muncul disiplin manajemen risiko dimana pendekatan manajemen sains kemudian dipadukan dengan disiplin riset operasi yang dikembangkan oleh dunia militer. Riset operasi yang berkembang saat perang dunia ke-II diawali penerapannya pada operasi militer untuk menjamin tersedianya logistik secara efektif dan efisien (Basyaib, 2007:3). Manajemen risiko pada waktu itu masih bersifat tradisional karena masih berfokus pada perlindungan secara fisik misalnya perlindungan dari bencana alam, kebakaran, dan kecelakaan.

Seiring dengan bertambahnya waktu, manajemen risiko mulai berkembang dan mulai dituangkan dalam sebuah pedoman untuk dijadikan standar bagi dunia internasional. Salah satunya adalah *Committee of Sponsoring Organizations on the Treadway Commission* (COSO) yaitu organisasi sektor privat yang dibentuk pada tahun 1985 dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelaporan keuangan melalui etika bisnis, pengendalian internal, tata kelola (*corporate governance*) (Rai, 2008:86).

Ini sejalan dengan tugas Komite Audit yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal perusahaan. Pada tahun 2004, COSO mulai mengembangkan kerangkanya dengan menerbitkan Kerangka Manajemen Risiko Perusahaan atau *Enterprise Risk Management* (Yatim, 2009). Standar manajemen risiko tersebut merupakan hasil karya sebuah tim gabungan dari tiga organisasi manajemen risiko utama di Inggris – yaitu *The Institute of Risk Management (IRM)*, *The Association of Insurance and Risk Managers (AIRMIC)*, dan *The National Forum for Risk Management in the Public Sector (ALARM)*.

Masing-masing negara bagian di Australia menerbitkan sendiri *Government Risk Management Framework/Guidelines (GRM Framework/Guidelines)* dan negara tersebut menggunakan Standar Manajemen Risiko Nasionalnya yaitu *Australian Standard/New Zealand Standard 4360:2004 Risk Management* sebagai acuan. Pada tahun 2010, standar nasional tersebut mengalami perubahan menjadi *AS/NZS ISO 31000:2010* maka *GRM Framework/Guidelines* masing-masing negara bagian juga berubah menyesuaikan dengan standar nasional tersebut. Hal ini terlihat antara lain pada negara bagian Queensland, Victoria dan West Australia yang merevisi *GRM Framework/Guidelines* mereka pada tahun 2011 sesuai dengan *AS/NZS ISO 31000:2010* tersebut.

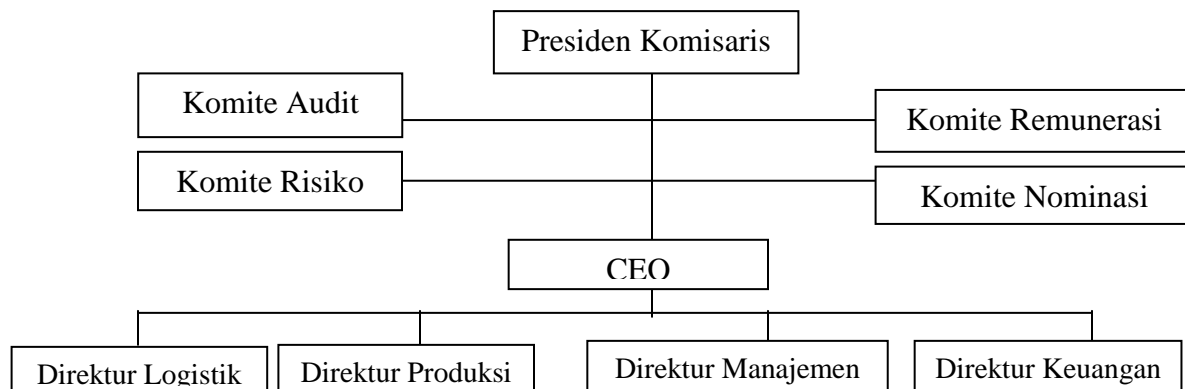
Seiring berubahnya standar nasional di Australia tersebut menjadi *AS/NZS ISO31000:2010*, pada tahun yang sama berdiri sebuah organisasi di Indonesia yang bergerak di bidang keilmuan manajemen risiko yang memfasilitasi praktik mengenai manajemen risiko yaitu *CRMS (Center for Risk Management Studie)*. Organisasi

tersebut mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi melalui seminar yang dikemas dengan pelatihan akan pentingnya manajemen risiko bagi praktisi maupun akademisi dan sertifikasi profesi manajemen risiko berbasis ISO 31000.

### 2.1.5. Komite Manajemen Risiko (RMC)

Komite Manajemen Risiko adalah sebuah komite pengawas manajemen yang terpisah dari audit dan berdiri sendiri, yang secara khusus bertugas menyediakan pembelajaran mengenai sistem manajemen risiko, mengembangkan fungsi pengawasan risiko pada level Dewan Komisaris, dan mengevaluasi laporan risiko perusahaan (KPMG, 2001 dalam Purbawati, 2011). Manajemen risiko lebih efektif jika Komite Manajemen Risiko ditempatkan langsung di bawah Direktur Utama sehingga seluruh risiko perusahaan baik itu risiko operasional maupun risiko keuangan dapat diperhatikan (Kountur, 2006:142).

**Gambar 2.1**  
**Organisasi pada Tingkat *Corporate Governance***



Sumber : Djohanputro, 2013

Struktur organisasi pada gambar 2.1 merupakan struktur organisasi yang efektif dimana komite pengawas lebih tepat berada di bawah Dewan Komisaris. Ada empat komite yang perlu dibentuk untuk mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Komite yang berurusan dengan risiko terdiri dari Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi, dan Komite Risiko. Keempat komite tersebut mempunyai fungsi yang berbeda, dimana Komite Audit secara umum bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komite Remunerasi membantu Dewan Komisaris untuk menentukan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Nominasi memberikan rekomendasi tentang jumlah Direksi dan Dewan Komisaris sedangkan Komite Risiko atau Komite Manajemen Risiko membantu mengidentifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris berkaitan dengan manajemen risiko Perseroan. Hubungan antara Komite Audit dan komite lainnya dalam tata kelola perusahaan penting untuk memungkinkan masing-masing komite memenuhi tanggung jawabnya secara efektif. Jika perusahaan memiliki Komite Manajemen Risiko maka Komite Audit harus menyadari tanggung jawab dan hasil pertemuan Komite Manajemen Risiko tersebut. Hal ini akan meminimalkan kemungkinan Komite Audit menduplikasi kerja yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko dan/atau mengidentifikasi kesenjangan yang membutuhkan perhatian. Oleh karena itu, jalur komunikasi antara Komite Audit dan komite lainnya, perlu dibentuk untuk memungkinkan masing-masing komite untuk berbagi informasi baru dan relevan dan beroperasi secara kooperatif dan saling melengkapi.

RMC (*Risk Management Committee*) atau Komite Manajemen Risiko menjadi mekanisme yang efektif dalam mendukung tanggung jawab Dewan Komisaris dalam pengawasan risiko, manajemen risiko dan pengendalian internal (Subramaniam, *et al.*, 2009). RMC diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu (Puspaningrum (2013):

- 1) RMC tergabung, dimana pengungkapan RMC dalam *annual report* perusahaan tergabung dengan Komite Audit atau dibawah Komite Audit.
- 2) RMC terpisah, dimana pengungkapan RMC dalam *annual report* perusahaan terpisah dengan Komite Audit, sehingga berdiri sendiri sebuah komite yang bernama *Risk Management Committee* atau RMC.

Pertentangan mengenai keputusan Dewan Komisaris untuk membentuk Komite Manajemen Risiko yang tergabung dengan Komite Audit atau Komite Manajemen Risiko yang terpisah dengan Komite Audit (RMC) mempengaruhi keefektifan pemantauan di antara kedua komite pengawas tersebut. Mengingat kompleksitas risiko yang dihadapi oleh banyak perusahaan, tanggung jawab *risk oversight* yang diberikan kepada Komite Manajemen Risiko yang tergabung dengan Komite Audit terkadang kurang efektif dikarenakan tugas komite audit yang kompleks. Ada beberapa hal seperti fokus, kerangka acuan, atribut yang membuat Komite Audit memiliki perbedaan dengan Komite Manajemen Risiko yang terpisah dari Komite Audit (RMC) pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Komite Audit dan RMC**

<b>Komite Audit</b>	<b>RMC</b>
<b>Fokus</b>	
<i>-Historical Performance</i>	<i>-Future performance</i>
-Efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan dengan hukum dan peraturan yang berlaku	-Risiko yang lebih luas di tingkat strategis, manajerial, dan operasional.
	-Risiko dengan keuangan dan / atau non keuangan
<b>Kerangka Acuan</b>	
<b>Audit</b>	<b>Penilaian risiko</b>
-Memastikan bahwa audit eksternal dan audit internal perusahaan yang cukup untuk mengatasi risiko usaha.	-Memastikan bahwa manajemen perusahaan secara teratur menilai risiko dan memperbarui daftar risiko.
	-Memastikan bahwa penilaian risiko merupakan bagian dari pembuatan keputusan dan tingkat risiko yang diambil oleh direktur
<b>Pengendalian internal</b>	<b>Manajemen Risiko</b>
-Memastikan manajemen sudah melakukan pengendalian internal pada risiko bisnis.	-Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan sistem manajemen risiko dengan menilai, mengontrol, dan memantau semua risiko.
-Memastikan bahwa pengendalian internal berjalan efektif.	
<b>Pelaporan Keuangan</b>	<b>Pelaporan Risiko</b>
-Meninjau laporan keuangan perusahaan, khususnya dalam memastikan bahwa tugas direksi pada pengungkapan dan representasi dari keuangan perusahaan.	-Meninjau informasi dan laporan ke direksi atas risiko utama perusahaan.
<b>Atribut</b>	
-Analitik	-Analitik dan kreatif
-Kuantitatif	-Kualitatif
-Keahlian keuangan	-Pengalamannya luas

Suatu perusahaan yang mempunyai RMC yang berdiri sendiri dan terpisah dari Komite Audit akan membuat anggota Komite Audit lebih fokus pada tugasnya

secara penuh pada berbagai proses dan pelaporan risiko, serta dapat menyediakan kualitas yang lebih baik dalam pengawasan internal daripada suatu perusahaan yang mempunyai RMC yang digabung dengan Komite Audit (Sambera, 2012). Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki RMC diharapkan juga akan fokus pada tugasnya. Tugas utama dari *Risk Management Committee* adalah sebagai berikut (Kountur, 2006:143):

1. Mengidentifikasi risiko operasional. Jika pendekatan manajemen risiko operasional yang digunakan adalah *top-down* identifikasi risiko dilakukan kepada perusahaan secara umum. Namun jika pendekatan yang digunakan *bottom up* identifikasi risiko dilakukan pada setiap unit atau bagian dari organisasi.
2. Mengukur semua risiko yang telah teridentifikasi. Output yang dihasilkan dari pengukuran risiko ini berupa peta risiko (*risk map*).
3. Memberikan rekomendasi. Rekomendasi diberikan kepada pimpinan-pimpinan di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas risiko-risiko yang telah teridentifikasi dan terukur berupa strategi-strategi penanganan risiko yang relevan untuk menangani risiko-risiko tersebut.

#### **2.1.6. Tujuan Manajemen Risiko**

Tujuan yang ingin dicapai dalam mempelajari konsep manajemen risiko ini antara lain sebagai berikut (Sofyan, 2005:3):

1. Untuk meningkatkan kapabilitas kepemimpinan seorang manajer perusahaan.
2. Untuk menumbuhkan sifat dinamis dan progresif seorang manajer perusahaan.

3. Untuk mengurangi sebanyak mungkin pengambilan keputusan yang didasari atas intuisi dan perasaan seorang manajer.
4. Untuk meningkatkan keterampilan penggunaan alat analisis manajemen risiko dalam proses pembuatan keputusan seorang manajer perusahaan

### **2.1.7. Peraturan Manajemen Risiko**

Peraturan yaitu sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang atau lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama. Peraturan-peraturan dapat mencegah timbulnya masalah terutama berhubungan dengan manajemen risiko.

#### **2.1.7.1. COSO**

Organisasi yang terkait dengan audit dan akuntansi serta keuangan di USA seperti AICPA, AMA, FEI, IIA, dan IMA mensinyalir adanya hal-hal yang tidak beres karena meningkatnya *fraudulent financial reporting* pada awal dekade 80-an. Banyak pendapat memperkirakan bahwa biang keladi dari kegagalan adalah kelemahan *internal control* pada perusahaan-perusahaan yang bersangkutan sehingga terbentuklah COSO (*Committee On Sponsoring Organization of The Treadway Commission*). COSO menerbitkan laporannya yang berjudul “Report of the National Commission on Fraudulent Financial Report” pada Oktober 1987 dan laporan tersebut dikirimkan pada semua institusi yang berkepentingan termasuk SEC (*Securities Exchange Commission*) dan lembaga pendidikan akuntansi dan auditing. *Framework Internal Control* COSO dipublikasikan pada tahun 1992 dan disempurnakan tahun 1994. Kemudian ditetapkan pula proses pencapaian tujuan

tersebut melalui 5 (lima) *Component Internal Control* sebagai berikut (Dunil, 2005:37-38):

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penaksiran Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

#### **2.1.7.2. ISO 31000**

ISO 31000 merupakan standar manajemen risiko yang generik, berarti standar ini tidak menafikan standar-standar manajemen risiko yang dibuat untuk keperluan yang spesifik dan khusus. Keduanya dapat berjalan berdampingan dan saling melengkapi. Satu hal yang membedakan ISO 31000 dengan standar manajemen risiko yang lain adalah perspektif ISO 31000 yang lebih luas dan lebih konseptual dibandingkan dengan lainnya. Walaupun standar ini menyediakan panduan generik, hal ini tidak dimaksudkan untuk melakukan keseragaman penerapan manajemen risiko akan tergantung pada kebutuhan yang bervariasi dari setiap organisasi, khususnya sasaran dari setiap organisasi yang berbeda, konteks, struktur, produk, jasa, proyek, dan proses operasi, serta praktik-praktik khas yang digunakan (Susilo dan Kaho, 2011).

Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) dalam ISO 31000 mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen risiko harus berkaitan dengan hal-hal berikut (Gaspersz,2013:584):

- 1) Menciptakan nilai-sumber daya yang dikeluarkan untuk mengurangi risiko harus menjadi lebih sedikit daripada konsekuensi tidak bertindak, atau (seperti dalam rekayasa nilai), nilai manfaat secara keseluruhan harus lebih besar daripada biaya secara umum.
- 2) Menjadi bagian integral dari proses-proses organisasi.
- 3) Menjadi bagian dari pembuatan keputusan.
- 4) Secara eksplisit memperhatikan ketidakpastian dan asumsi-asumsi.
- 5) Harus sistematis dan terstruktur.
- 6) Berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia.
- 7) Mampu menyesuaikan.
- 8) Mempertimbangkan faktor-faktor manusia.
- 9) Harus transparan dan inklusif.
- 10) Bersifat dinamik, iteratif dan tanggap terhadap perubahan.
- 11) Mampu melakukan perbaikan atau peningkatan terus-menerus.
- 12) Melakukan penilaian kembali secara berkala atau secara terus-menerus.

#### **2.1.8. Audit Berbasis Risiko**

Pendekatan Audit Berbasis Risiko (ABR) adalah suatu metodologi audit yang dapat dijalankan oleh auditor internal dalam pelaksanaan penugasan auditnya melalui pendekatan dan pemahaman atas risiko yang harus diantisipasi, dihadapi, atau dialihkan oleh manajemen guna mencapai tujuan (Supono dan Agus Yulianto, 2007). Tugas auditor internal antara lain adalah mengaudit risiko, melakukan evaluasi risiko, mengusulkan pendirian manajemen risiko sambil menjelaskan manfaat manajemen

risiko, atau menyatakan dukungan atas program manajemen risiko. Auditor internal menerima instruksi dan bagian peran audit internal dalam manajemen risiko dari Komite Audit, agar secara independen auditor mengevaluasi manajemen risiko dan program memerangi risiko (Hoesada, 2014).

Agar pelaksanaan manajemen risiko dapat berjalan efektif maka aspek-aspek yang perlu dipahami auditor dalam melakukan pendekatan ABR adalah sebagai berikut (Hoesada, 2014):

1. Dalam menerapkan ABR, auditor perlu mengidentifikasi wilayah atau area yang memiliki risiko yang menghambat pencapaian tujuan manajemen. Misalnya dalam audit keuangan, risiko salah saji yang besar pada penyajian laporan keuangan. Wilayah atau area yang memiliki tingkat risiko yang tinggi tersebut akan memerlukan pengujian yang lebih mendalam.
2. Auditor dapat mengalokasikan sumber daya auditnya berdasarkan hasil identifikasi atas kemungkinan dan dampak terjadinya risiko. Wilayah berisiko rendah menjadi prioritas akhir alokasi sumber daya audit.

Oleh karena itu, dalam ABR, auditor harus melakukan analisis dan penaksiran risiko yang dihadapi auditi. Dalam melakukan analisis dan penaksiran risiko (*risk assessment*), auditor perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Risiko kegiatan dari auditi (*the auditee business risk*), yaitu risiko terjadinya suatu kejadian yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen. Risiko yang dimaksud bukan hanya risiko atas salah saji laporan keuangan namun juga risiko tidak tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

2. Cara manajemen mengurangi atau meminimalisasi risiko.
3. Wilayah atau area yang mengandung risiko dan belum diidentifikasi oleh manajemen secara memadai atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh manajemen.

### **2.1.9. Karakteristik Komite Audit**

Komite Audit lazimnya adalah merupakan suatu komite yang berhubungan dengan Dewan Komisaris dan biasanya terdiri dari *non executive directors* yang independen terhadap manajemen. Bentuk dan jumlahnya berbeda pada beberapa negara. Pembentukan suatu Komite Audit yang permanen adalah solusi untuk mengatasi kesulitan praktik yang timbul dari tugas Dewan Komisaris untuk meyakini eksistensi dan mempertahankan sistem pengendalian yang cukup. Dapat ditambahkan, keberadaan Komite Audit adalah memperkuat sistem pengendalian intern, internal dan dan eksternal audit (Dunil, Z.2005:72).

#### **2.1.9.1. Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit**

Ada hubungan yang erat antara akuntansi dan keuangan tetapi keduanya mempunyai definisi yang berbeda. Menurut Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian (2002:34) dalam Arpiani (2007), pengertian keuangan sebagai berikut:

“Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrument yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah.”

Sedangkan definisi akuntansi menurut *American Institute of Certified Public Accountant* (1953) adalah seni (*art*) mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas

transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang, atau paling tidak memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasilnya (Ghozali, Imam dan Anis Chariri, 2007:51).

Anggota Komite Audit dengan latar belakang keuangan memiliki pengalaman dan pelatihan untuk memahami kegiatan manajemen risiko, diharapkan bahwa perusahaan dengan setidaknya satu Direktur finansial berpengetahuan pada Komite Audit sehingga mereka lebih aktif terlibat dalam manajemen risiko (Yatim, 2009). Anggota yang berpengetahuan keuangan ialah anggota yang pada saat ini maupun sebelumnya pernah mempunyai posisi atau melakukan aktivitas yang berkaitan dengan keuangan, dan anggota yang mempunyai latar belakang pendidikan keuangan atau akuntansi (Dionne dan Triki, 2005 dalam Wulandari, 2012).

Menurut Zarkasyi (2008), Komite audit harus memiliki akuntabilitas tinggi, dimulai dengan pemenuhan persyaratan generik dari anggota Komite Audit, yang secara tim setidaknya memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup di bidang sebagai berikut: a) Audit, Akuntansi dan Keuangan: pemahaman mendalam konsep dan praktik mengenai *Financial Engineering, Corporate Finance, Internal Control, Risk Management, dan Auditing* (Audit Keuangan, Audit Operasional, dan Audit Khusus), serta *Fraud Examination*; b) Peraturan dan Perundangan: pemahaman mendalam konsep dan praktik peraturan dan perundangan termasuk tetapi tidak terbatas mengenai Pasar Modal, Pasar Uang, Pasar Komoditi berjangka, Bursa Saham, Undang-undang PT, Undang-Undang BUMN (No. 19 Tahun 2003) dan GCG.

### **2.1.9.2. Ukuran Komite Audit**

Jumlah anggota Komite Audit menunjukkan seberapa besar sumber daya yang dialokasikan perusahaan untuk melakukan pengawasan dan menghadapi berbagai permasalahan perusahaan (Habibah, 2013). Komite Audit yang lebih besar cenderung mendukung pembentukan Komite Manajemen Risiko karena hal ini akan meningkatkan tanggung jawab pengawasan mereka (Yatim, 2009).

### **2.1.9.3. Frekuensi Rapat Komite Audit**

Menurut peraturan BAPEPAM dijabarkan bahwa rapat Komite Audit sebagai berikut:

- Komite Audit mengadakan rapat paling kurang sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
- Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota;
- Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan anggota Komite Audit semakin rajin dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam hal mengadakan rapat secara rutin dengan pihak yang berkepentingan untuk menentukan alternatif-alternatif tindakan

dan rekomendasi dalam menghadapi risiko agar Komite Audit dapat mengambil keputusan yang efektif dan bisa diterima.

## **2.1.10. Karakteristik Perusahaan**

### **2.1.10.1. Risiko Pelaporan Keuangan**

Perusahaan dengan proporsi aset yang lebih besar pada piutang usaha dan persediaan cenderung untuk memiliki risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi dikarenakan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam data akuntansi (Koroses dan Horvat, 2005 dalam Subramaniam, *et al.*, 2009). Potensi kesalahan perhitungan yang besar tersebut menimbulkan risiko pelaporan yang tinggi. Oleh karena itu, keberadaan RMC, akan dapat memfasilitasi perusahaan dengan kualitas pengawasan risiko pelaporan keuangan yang lebih baik (Diani, 2013).

Beberapa *paper* menunjukkan bahwa perkembangan persyaratan pelaporan tata kelola perusahaan menawarkan kesempatan untuk apropriasi risiko dan pengelolaannya oleh kelompok-kelompok yang ingin memajukan kepentingan mereka sendiri. Beberapa hasil keuangan akan terpengaruh oleh ketidakpastian, sehingga risiko komitmen manajemen mungkin memiliki pengaruh pada kinerja keuangan. Informasi keuangan yang dapat dilayani oleh pelaporan keuangan (*financial reporting*) hanya merupakan sebagian jenis informasi yang diperlukan oleh investor dan kreditor. Oleh karena itu, terkadang dalam tata kelola perusahaan yaitu pihak-pihak seperti setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen dan pekerja harus menghindarkan diri dari situasi yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di

dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002 dalam Priantinah, 2008).

#### **2.1.11. Kompensasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris**

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER- 02 /MBU/2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara menyebutkan pada ayat (1) bahwa Penghasilan atau kompensasi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Persero ditetapkan oleh RUPS. Penetapan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan yang bersangkutan, tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari kompensasi adalah untuk menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan pengelola aset (Meilinda, Maria dan Nur Cahyonowati, 2013). Adanya pemberian kompensasi ini diharapkan akan mempengaruhi kinerja Dewan misalnya dalam hal pengawasan manajemen risiko oleh Komite Manajemen Risiko dimana komite tersebut berada dibawah Dewan Komisaris.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan gambaran konkrit tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian, dimana di dalamnya dapat diperbandingkan antar hasil penelitian yang ada sehingga dapat memberikan kontribusi nantinya. Penelitian terdahulu lebih banyak menyinggung mengenai pengaruh Dewan Komisaris atau Dewan Direksi yang mempengaruhi keberadaan Komite Manajemen Risiko.

Yatim (2009) meneliti tentang pembentukan RMC dengan karakteristik Komite Audit, yaitu independensi, keahlian keuangan, ukuran komite, dan ketekunan. Di dalam penelitiannya ditemukan bahwa independensi Komite Audit, ukuran Komite Audit, dan ketekunan Komite Audit berhubungan positif dengan pembentukan RMC. Sedangkan variabel kontrolnya yaitu ukuran perusahaan, kompleksitas operasi organisasi, dan reputasi auditor juga berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC. Penelitian ini menggunakan analisis *cross-sectional* dari 690 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia.

Subramaniam, *et al.*, (2009) melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara karakteristik Dewan dan karakteristik perusahaan terhadap keberadaan RMC dan tipe RMC. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa RMC cenderung berada pada perusahaan yang memiliki CEO independen dan ukuran dewan yang besar. CEO independen dan ukuran Dewan berpengaruh positif terhadap SRMC. Penelitian ini menggunakan 200 perusahaan yang terdaftar dalam Australia Stock Exchange (ASX).

Penelitian yang dilakukan Wulandari (2010) ditemukan hasil bahwa ukuran dan ketekunan Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pembentukan RMC sedangkan variabel independen dan keahlian Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pembentukan RMC. Sampel penelitian ini adalah perusahaan *non financial* yang listing di BEI tahun 2009-2010 dengan analisis data menggunakan regresi logistik.

Sambera (2012) melakukan penelitian mengenai Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pembentukan Komite Manajemen Risiko. Penelitian dilakukan pada perusahaan finansial non perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC dan SRMC. Kompleksitas berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.

Habibah (2013) meneliti Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) pada perusahaan *non-financial* Indonesia yang terdaftar di Bloomberg pada tahun 2009-2011. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap keberadaan RMC adalah ukuran dan aktivitas Komite Audit serta aktivitas Dewan Komisaris sedangkan variabel kontrol yang berpengaruh positif terhadap RMC yaitu ukuran perusahaan dan kompleksitas.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Puspaningrum (2013) yaitu Dewan Komisaris, Komisaris Independen, reputasi Auditor Eksternal, kompleksitas perusahaan, risiko pelaporan keuangan, *leverage* dan keberadaan RMC. Perusahaan yang listing di BEI tahun 2011 dijadikan sebagai sampel penelitiannya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif dengan keberadaan RMC dan *leverage* berhubungan positif dengan keberadaan SRMC sedangkan variabel lainnya ditolak.

Penelitian yang akan dilakukan mengacu pada penelitian Yatim (2009). Penelitian ini menggunakan beberapa variabel terdahulu tersebut dan menambahkan variabel baru serta perubahan sampel perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan tempat penelitian di Indonesia.

**Tabel 2.3**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1	Yatim (2009)	Pembentukan RMC	Independensi, keahlian akuntansi dan keuangan, ukuran, ketekunan Komite Audit	Pembentukan RMC berhubungan positif dengan independensi, ukuran, dan ketekunan Komite Audit tetapi keahlian akuntansi dan keuangan tidak berhubungan positif terhadap pembentukan RMC.
2	Subramaniam, (2009)	Keberadaan RMC dan tipe RMC	Proporsi Komisaris Independen, CEO Duality, dan ukuran dewan, tipe auditor eksternal, tipe industri, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, dan <i>leverage</i> .	CEO independen dan ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan RMC atau SRMC, dan risiko pelaporan keuangan berhubungan positif dan signifikan terhadap SRMC. Proporsi Komisaris Independen, tipe auditor eksternal, tipe industri, kompleksitas, dan <i>leverage</i> tidak signifikan dengan

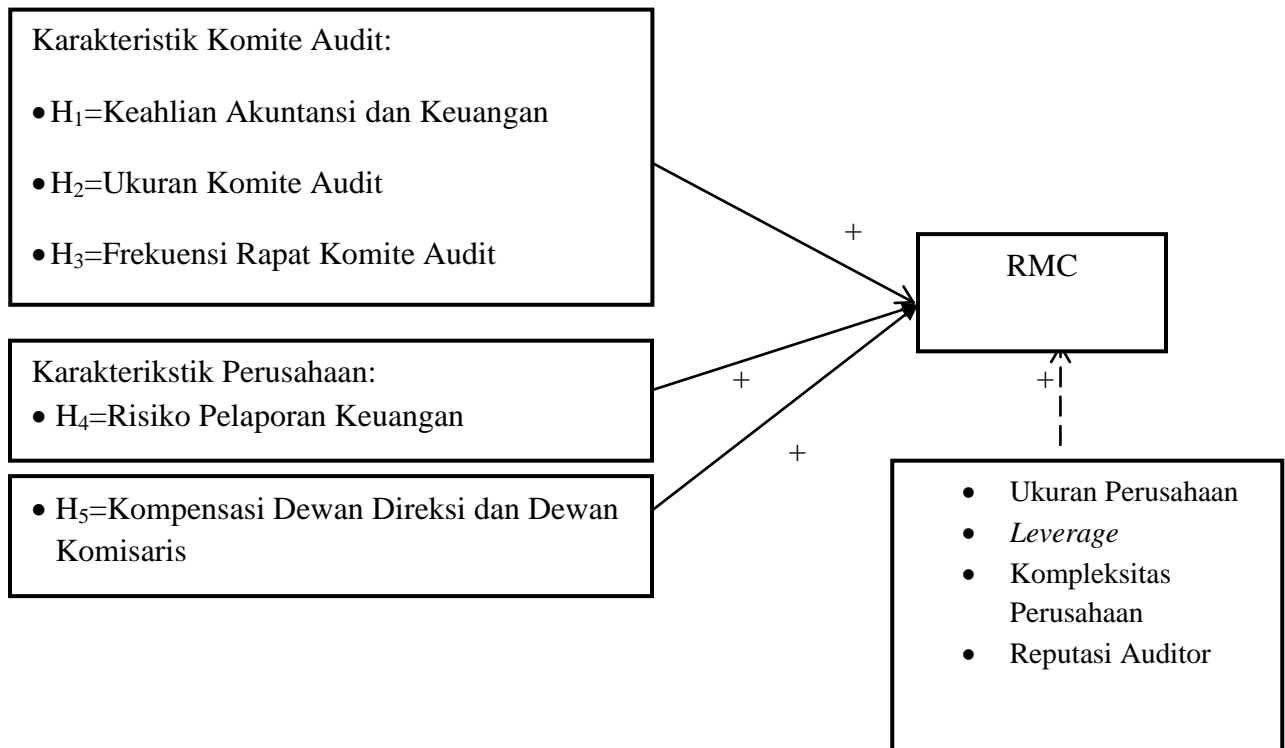
				keberadaan RMC dan tipe RMC.
3	Wulandari (2012)	Pembentukan RMC	Independensi, keahlian keuangan, ukuran dan ketekunan Komite Audit	Ukuran dan ketekunan Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC sedangkan independensi dan keahlian keuangan Komite Audit tidak signifikan terhadap pembentukan RMC.
4	Sambera (2013)	Keberadaan RMC	Independensi, ukuran, frekuensi rapat Dewan Komisaris, risiko pelaporan keuangan, <i>leverage</i> , dan kompleksitas	Independensi, ukuran, frekuensi rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh dengan keberadaan RMC. Risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC, <i>leverage</i> tidak berpengaruh dengan keberadaan RMC dan kompleksitas berpengaruh positif terhadap RMC tetapi tidak berpengaruh terhadap SRMC.
5	Habibah (2013)	Pembentukan RMC	Independensi, ukuran, aktivitas, keahlian akuntansi dan keuangan Komite Audit dan ukuran, proporsi, aktivitas Dewan Komisaris	Ukuran dan aktivitas Komite Audit serta aktivitas Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC. Independensi dan keahlian akuntansi dan keuangan Komite Audit serta ukuran dan proporsi Dewan Komisaris tidak signifikan dengan pembentukan RMC.
6	Puspaningrum (2013)	RMC dan SRMC	Jumlah anggota dan Independensi Dewan Komisaris,	Reputasi auditor eksternal berpengaruh positif dengan RMC dan <i>leverage</i>

			Reputasi Auditor Eksternal, Kompleksitas Perusahaan, Risiko Pelaporan Keuangan, <i>Leverage</i>	berhubungan positif dengan keberadaan SRMC. Jumlah anggota dan Independensi Dewan Komisaris, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan tidak signifikan terhadap RMC dan SRMC.
--	--	--	---	--

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menguji hubungan antara karakteristik Komite Audit dan karakteristik perusahaan dan kompensasi Dewan terhadap RMC yang dibentuk perusahaan, apakah tergabung dengan Komite Audit atau berdiri sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan karakteristik Komite Audit, karakteristik perusahaan, dan kompensasi Dewan sebagai variabel independen. Karakteristik Komite Audit dalam penelitian ini meliputi keahlian akuntansi dan keuangan Komite Audit, ukuran Komite Audit, dan frekuensi rapat Komite Audit. Sementara karakteristik perusahaan yang diteliti meliputi risiko pelaporan keuangan dan variabel baru yang ditambahkan pada penelitian ini adalah kompensasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Didukung dengan variabel kontrol yang ikut mempengaruhi secara tidak langsung meliputi ukuran perusahaan, *leverage*, kompleksitas perusahaan, dan reputasi auditor. Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.4. Hipotesis

### 2.4.1. Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit terhadap *Risk Management Committee (RMC)*.

Penerapan praktik GCG yang baik dibutuhkan kontribusi dari Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Menurut teori agensi, untuk mengatasi konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, Komite Audit harus memiliki kemampuan yang memadai agar dapat meningkatkan efektivitasnya (Habibah, 2013). Menurut BAPEPAM, minimal

satu diantara anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan.

Komite Audit bertanggung jawab dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit, pengendalian proses internal, dan pelaporan keuangan yang membutuhkan kompetensi atau keahlian akuntansi dan keuangan sedangkan Komite Manajemen Risiko memiliki tanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko pada perusahaan. Disamping itu, Komite Audit memiliki peran penting dalam pengelolaan risiko *fraud*, risiko keuangan, dan risiko kepatuhan pada perusahaan. Hal ini menunjukkan keterkaitannya dengan Komite Manajemen Risiko yang bertugas memantau segala kegiatan manajemen risiko pada perusahaan. Oleh karena itu, semakin banyak anggota Komite Audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan akan mendukung adanya RMC karena dengan kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan tersebut dimana anggota Komite Audit tersebut sadar akan risiko yang dihadapi perusahaan, maka anggota Komite Audit tidak hanya mengawasi proses pelaporan akuntansi dan keuangannya yang menjadi risiko keuangan perusahaan tetapi banyak jenis risiko lainnya misalnya risiko operasional, risiko strategis, risiko eksternalitas yang harus diawasi pelaksanaannya sehingga anggota Komite Audit mendukung adanya Komite Manajemen Risiko agar pengawasan risiko dapat berjalan efektif dan sesuai tujuan perusahaan.

**H1: Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Risk Management Committee* (RMC).**

#### **2.4.2. Ukuran Komite Audit terhadap *Risk Management Committee* (RMC)**

Manajer terkadang berperilaku tidak untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham tetapi untuk kepentingannya sendiri sehingga keputusan yang dihasilkan tidak optimal. Manajer mengambil kebijakan investasi, operasi atau keuangan yang sesuai dengan risiko mereka atau pilihan waktu daripada pemegang saham (Byrd, *at al.*, 1998). Komite Audit dapat memberikan masukan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap aktivitas manajemen.

Penelitian Wulandari (2012) menyatakan bahwa masing-masing anggota Komite Audit memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda. Pertukaran pengetahuan itu membuat anggota Komite Audit semakin memahami permasalahan dan risiko yang dihadapi perusahaan. Semakin banyak jumlah anggota Komite Audit akan mendukung RMC karena jumlah anggota Komite Audit yang semakin banyak memiliki alternatif pengetahuan dan pemahaman yang banyak mengenai manajemen risiko dimana dengan pemahaman yang lebih mendalam akan membuat anggota Komite Audit tersebut mengetahui kekurangan pelaksanaan manajemen risiko oleh manajemen sehingga muncul rekomendasi atau saran kepada Dewan Komisaris dengan mendukung RMC. Pemantauan yang dilakukan RMC diharapkan akan semakin terfokus dan berbagai kekurangan tersebut bisa diselesaikan dengan lebih efektif.

**H2: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Separate Risk Management Committee* (SRMC).**

### 2.4.3. Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap *Risk Management Committee* (RMC).

Efektivitas Komite Audit dalam melaksanakan peran pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal memerlukan pertemuan rutin (Anggarini, 2010). Dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit dapat mengadakan rapat secara periodik sebagaimana ditetapkan oleh Komite Audit sendiri. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar menurut Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5. Rapat Komite Audit diharapkan mampu secara pro-aktif maupun *evaluative* menelaah semua hal-hal penting mengenai pelaporan keuangan perusahaan (Zarkasyi, 2008:21). Dengan sering bertemu, misalnya dengan auditor eksternal dan manajer, Komite Audit dapat menginformasikan dan menambah pengetahuan tentang masalah akuntansi dan manajemen risiko di dalam perusahaan (Habibah, 2013).

Disamping itu, Komite Audit juga membutuhkan saran atau masukan dari sub-komite lainnya khususnya *Risk Management Committee* yang mengawasi manajemen risiko perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Manajemen Risiko bekerja sama dengan Komite Audit untuk memberi saran dan masukan lainnya mengenai risiko potensial kepada Dewan Komisaris. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit. Sesuai dengan teori keagenan, hal tersebut dapat menurunkan asimetri informasi karena saran dan masukan dari kedua komite tersebut menjadi informasi yang bermanfaat

bagi *principal* untuk menghindari terjadinya manajemen mengungkapkan lebih sedikit informasi terkait risiko perusahaan. Oleh karena itu, Komite Audit yang menunjukkan frekuensi rapat yang lebih besar akan mendukung RMC karena dengan rapat yang banyak dilakukan Komite Audit akan diperoleh pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang manajemen risiko sehingga meningkatkan efektifitas pemantauan Komite Audit terkait aktivitas manajemen risiko oleh manajemen.

**H3: Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Risk Committee (RMC)*.**

#### **2.4.4. Risiko Pelaporan Keuangan terhadap *Risk Management Committee (RMC)*.**

Kondisi asimetri informasi terjadi dimana manajer berada dalam posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibanding pemegang saham. Terkadang pelaporan keuangan dapat menimbulkan asimetri informasi bagi investor. Laporan keuangan mempunyai banyak asumsi, penilaian, dan pilihan metode perhitungan yang dapat digunakan membuat manajemen memiliki cukup keleluasaan untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut sehingga risiko pelaporan keuangan menjadi tinggi maka diperlukan *monitoring* yang kuat untuk mengawasi manajemen dengan membentuk Komite Manajemen Risiko yang terpisah dari Komite Audit (RMC).

Penelitian Sambera (2013) menyatakan bahwa risiko pelaporan keuangan ini sangat berhubungan dengan *agency conflict* yang berpotensi dapat terjadi, yaitu *earning retention*. *Earning retention* adalah keadaan dimana manajemen cenderung

mempertahankan tingkat perusahaan yang stabil, yang bertujuan agar kinerja manajemen terlihat bagus. Hal ini sangat berkaitan dengan tingkat piutang usaha dan persediaan yang tinggi, sehingga di tingkat piutang usaha dan persediaan yang tinggi perusahaan cenderung akan membentuk RMC sebagai bentuk *monitoring* terhadap manajemen. Oleh karena itu, keberadaan RMC, khususnya RMC yang terpisah akan dapat memfasilitasi perusahaan dengan kualitas pengawasan risiko pelaporan keuangan yang lebih baik (Subramaniam *et al.*, 2009).

**H4: Risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap *Risk Management Committee* (RMC).**

#### **2.4.5. Kompensasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Risk Management Committee* (RMC).**

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: Per-07/Mbu/2010 mengatur mengenai Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. *Agency theory* mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai *principal* diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut (U R, Dhanis P. S, 2012).

Seorang Dewan Direksi sebagai manajer mempunyai tanggung jawab dalam mengoptimalkan keuntungan para *principle* dan sebagai imbalannya manajer akan mendapatkan kompensasi dengan perjanjian sehingga ada dua kepentingan dimana

masing-masing pihak berusaha untuk mencapai tujuannya (asimetri). Di sisi lain, Dewan Komisaris juga mendapatkan kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham atau *principle* dimana Dewan Komisaris memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Jadi Kompensasi Dewan diharapkan mendukung adanya RMC karena RMC yang dibentuk oleh Dewan Komisaris akan meningkatkan fungsi pengawasan dalam memastikan sistem pengendalian yang tepat khususnya mengenai sistem manajemen risiko oleh Dewan Direksi selaku manajemen sehingga selaras dengan kepentingan *principle*. Hal ini menunjukkan bahwa investor membutuhkan sebuah tampilan atas manajemen risiko yang baik dari manajemen yang dapat mendukung penciptaan nilai bagi pemegang saham.

**H5: Kompensasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Risk Management Committee* (RMC).**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menurut Sugiyono (2011:2) pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian ini membahas beberapa hal yang meliputi variabel penelitian, definisi operasional variabel, cara pengukuran variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis.

#### **3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini membahas tentang variabel independen yang terdiri dari karakteristik Komite Audit, karakteristik perusahaan, dan kompensasi Dewan, sedangkan variabel dependen yaitu Komite Manajemen Risiko serta ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, *leverage*, dan reputasi auditor sebagai variabel kontrol yang akan dijelaskan dengan definisi operasional dan pengukurannya.

##### **3.1.1. Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan (Sekaran, 2009:70). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah RMC atau Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko adalah sebuah komite pengawas manajemen yang terpisah dari audit dan berdiri sendiri, yang secara khusus bertugas menyediakan pembelajaran mengenai sistem manajemen

risiko, mengembangkan fungsi pengawasan risiko pada level Dewan Komisaris, dan mengevaluasi laporan risiko perusahaan (KPMG, 2001 dalam Purbawati, 2011). Penelitian ini menggunakan variabel *dummy* untuk struktur RMC, dengan variabel dependen dikodekan sebagai "1" jika perusahaan memiliki Komite Manajemen Risiko yang berdiri sendiri, "0" jika sebaliknya (Yatim, 2009).

Cara mengetahui RMC dikatakan RMC tergabung atau RMC terpisah dari Komite Audit dapat dilihat pada *annual report* jika perusahaan mengungkapkan hal sebagai berikut:

- Jika perusahaan mengungkapkan RMC tergabung dengan Komite Audit, maka dapat dilihat pada tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang berhubungan dengan manajemen risiko yaitu melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012.
- Perusahaan mempunyai RMC terpisah dari Komite Audit atau SRMC, jika perusahaan secara jelas mengungkapkan adanya Komite selain Komite Audit dibawah Dewan Komisaris yaitu Komite Manajemen Risiko yang dapat dilihat dari struktur tata kelola perusahaan baik itu struktur organisasi perusahaan, susunan anggota dan tugas Komite Manajemen Risiko misalnya melakukan penilaian berkala mengenai risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dan merumuskan langkah-langkah penanganan risiko.

### **3.1.2. Variabel Independen**

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif ataupun yang negatif bagi variabel dependen (Sekaran, 2009:72).

#### **1. Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit**

Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit merupakan kemampuan seorang anggota Komite Audit untuk melakukan sesuatu yang sifatnya spesifik, fokus namun dinamis khususnya bidang akuntansi dan keuangan yang membutuhkan waktu tertentu untuk dipelajari. Komite audit yang anggotanya memiliki keahlian akuntansi atau keuangan memiliki pengetahuan teknis yang relevan untuk meningkatkan pengawasannya terhadap Dewan sehingga akan lebih efektif dalam mendeteksi kesalahan penyajian yang material (Dezoort, 1998 dalam Habibah, 2013). Variabel keahlian akuntansi dan keuangan Komite Audit dapat diukur dengan membagi jumlah anggota Komite Audit yang memiliki keahlian keuangan dan/atau akuntansi dengan jumlah total anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit yang mempunyai keahlian akuntansi dan keuangan dapat dilihat dari salah satu kriteria misalnya anggotanya adalah lulusan sarjana ekonomi, anggota tersebut pernah bekerja pada Kantor Akuntan Publik, pernah bekerja sebagai Internal Auditor, atau anggota Komite Audit pernah berpengalaman menjadi Direktur Keuangan.

## **2. Ukuran Komite Audit**

Ukuran Komite Audit adalah jumlah keseluruhan dari anggota Komite Audit di perusahaan. Menurut Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota lain yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Ukuran Komite Audit diukur dari jumlah anggota Komite Audit (Yatim, 2009).

## **3. Frekuensi Rapat Komite Audit**

Peraturan BAPEPAM menyatakan bahwa Komite Audit mengadakan rapat paling kurang sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Intensitas aktivitas dewan, seperti frekuensi rapat ini dapat memberikan kontribusi dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen terhadap berbagai kepentingannya, yang mungkin saja ada suatu tindakan yang dapat merugikan bagi perusahaan maupun prinsipal (Sambera, 2013). Frekuensi rapat Komite Audit merupakan jumlah berapa kali pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh anggota Komite Audit dalam suatu perusahaan. Frekuensi rapat Komite Audit mengacu pada seberapa banyak jumlah pertemuan anggota Komite Audit yang diadakan dalam satu tahun (Wulandari, 2012).

## **4. Risiko Pelaporan Keuangan**

Risiko Pelaporan Keuangan adalah risiko yang disebabkan kesalahan perhitungan (Purbawati, 2011). Piutang usaha dan persediaan mempunyai kemungkinan kesalahan dalam penilaian, sehingga dapat meningkatkan risiko

pelaporan keuangan (Utomo, 2012). Risiko pelaporan keuangan diukur dengan membagi total piutang dan persediaan dengan aset yang dimiliki perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009).

$$\text{FINREP} = \frac{\text{Piutang Usaha} + \text{Persediaan}}{\text{Total Asset}}$$

## 5. Kompensasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

Kompensasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang dimaksud adalah kompensasi langsung yang merupakan penghargaan yang diterima Dewan dalam bentuk uang. Kompensasi langsung dapat berupa upah, gaji, insentif, komisi dan bonus (Dessler (2009) dalam Laura, 2012). Penelitian ini menggunakan proksi logaritma natural dari nilai total kompensasi yang diterima Dewan Direksi dan Dewan Komisaris selama satu tahun. Proksi tersebut digunakan karena logaritma natural sering digunakan untuk analisis dalam memecahkan persamaan yang pangkatnya cukup besar dan proksi ini pernah digunakan dalam penelitian Armstrong *et al.*, (2012) dalam mengukur kompensasi eksekutif. Data kompensasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris terdapat dalam pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan Perusahaan (Irawan dan Aria Farahmita, 2012).

### 3.1.3. Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan 4 variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, kompleksitas perusahaan dan reputasi auditor. Variabel kontrol adalah

variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti.

### 1. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Ukuran perusahaan dapat menggambarkan besar kecilnya skala ekonomi suatu perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan menghitung logaritma natural jumlah aset yang dimiliki perusahaan (Chen, *et al.*, 2009 dalam Utomo, 2012). Ukuran tersebut digunakan karena logaritma natural sering digunakan untuk memecahkan persamaan yang pangkatnya tidak diketahui dan mempermudah perhitungan dimana ketika total aset besar maka semakin besar ukuran perusahaan.

$$\text{Size} = \text{Log}(\text{total aset})$$

### 2. *Leverage*

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi pada suatu waktu disebut dengan *leverage* (Puspaningrum, 2013). *Leverage* dinyatakan dalam rasio yang dihitung dengan cara membagi total utang dengan total aset (Yatim, 2009).

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

### 3. Kompleksitas Perusahaan

Kompleksitas perusahaan dapat didefinisikan sebagai komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa (baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk atau jasa terkait) dan komponen ini memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Kompleksitas bisnis diukur dengan menjumlah total segmen bisnis yang dimiliki oleh perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009). Jadi segmen bisnis yang diperoleh dilihat dari jenis usaha yang mewakili kegiatan utama usaha perusahaan yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan.

### 4. Reputasi Auditor

Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar auditor tersebut (Badera dan Rudyawan, 2009 dalam Susanti, 2013). Reputasi auditor diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dimana kode 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big 4* sedangkan kode 0 jika KAP non *Big 4* (Verdiana dan I Made Karya Utama, 2013). KAP besar atau KAP *Big 4* terdiri dari *Pricewaterhouse Cooper*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *Ernst & Young*, dan KPMG.

Setelah dijelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya variabel-variabel tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Ringkasan Definisi Operasional Variabel Penelitian**

No	Variabel	Skala	Pengukuran
1	<i>Risk Management Committee</i>	Nominal	RMC = dummy 1 dan 0; 1 untuk RMC terpisah dengan Komite Audit dan 0 untuk sebaliknya.
2	Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit	Rasio	$ACE_{exp} = \frac{\text{jumlah anggota Komite Audit yang mempunyai keahlian \& keuangan}}{\text{jumlah anggota Komite Audit}}$
3	Ukuran Komite Audit	Rasio	ACSize = Jumlah anggota Komite Audit
4	Frekuensi Rapat Komite Audit	Rasio	ACDilig = Jumlah pertemuan Komite Audit selama satu tahun
5	Risiko Pelaporan Keuangan	Rasio	$FINREP = \frac{\text{Total piutang Usaha + persediaan}}{\text{Total aset}}$
6	Kompensasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris	Rasio	Comp = Log (total kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi selama satu tahun)
7	Ukuran Perusahaan	Rasio	Size = Log (Total aset)
8	Kompleksitas Perusahaan	Rasio	Segm = Jumlah segmen bisnis perusahaan
9	<i>Leverage</i>	Rasio	$Levr = \frac{\text{Total liabilitas}}{\text{Total aset}}$
10	Reputasi Auditor	Nominal	Rep = dummy 1 dan 0; 1 untuk KAP <i>Big 4</i> dan 0 untuk KAP lainnya.

### 3.2. Populasi dan Sampel

Populasi (*population*) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2009:262). Populasi yang digunakan penelitian ini adalah perusahaan *non financial* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan *financial* seperti bank atau perusahaan asuransi tidak

termasuk dalam sampel penelitian ini karena keberadaan RMC sudah diwajibkan pada perusahaan *financial* sehingga tidak perlu diteliti.

Sampel terdiri dari atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2011:123). Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan telah memakai teknik *cross-sectional studies* dimana pengambilan data dilakukan hanya 1 kali saja dan mencerminkan ‘potret’ dari suatu keadaan pada satu saat tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik sampel dengan metode *purposive sampling*. Sampel dipilih melalui metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yaitu:

1. Perusahaan *non financial* yang terdaftar sebagai perusahaan *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2010-2012.
2. Perusahaan yang menerbitkan *annual report* dan laporan keuangan pada periode tahun 2010-2012 karena tahun tersebut relevan dengan seiring diterbitkannya Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia pada tahun 2006 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-10/MBU/2012.
3. Datanya lengkap dan siap untuk diteliti serta terdapat data mengenai variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
4. Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah di dalam laporan keuangan dan laporan tahunan untuk periode tahun 2010-2012 karena penelitian dilakukan pada perusahaan *non financial* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan proses translasi dari mata uang asing ke Rupiah mempunyai kelemahan karena kondisi antar negara yang berbeda misalnya adanya

fluktuasi nilai tukar sehingga tidak selalu mencerminkan nilai yang sesungguhnya dari mata uang tersebut.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan perusahaan *non financial* tahun 2010-2012. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu RMC dalam perusahaan, keahlian akuntansi dan keuangan Komite Audit, ukuran Komite Audit, frekuensi rapat Komite Audit, risiko pelaporan keuangan, kompensasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, ukuran perusahaan, *leverage*, kompleksitas perusahaan dan reputasi auditor. Data yang diperoleh berasal dari publikasi laporan tahunan dan laporan keuangan di pojok BEI Universitas Diponegoro, dan *website* resmi BEI <http://www.idx.co.id>, serta *website* resmi perusahaan.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder berupa *annual report* perusahaan *non financial* yang diperoleh dari situs resmi BEI dan pojok BEI Universitas Diponegoro.

### **3.5. Metode Analisis**

Metode analisis penelitian ini untuk menguji hipotesis dan menginterpretasikan atas perolehan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis menggunakan *logistic regression* sesuai dengan kerangka penelitian sebelumnya. Pada dasarnya *logistic regression* sama dengan analisis diskriminan; perbedaan ada pada jenis data dari variabel dependen (Santoso, 2010:206 dalam Yusrianti, 2012).

#### **3.5.1. Analisis Deskripsi Variabel Penelitian**

Statistik deskripsi memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011). Analisis statistika deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif bagi orang yang membacanya.

#### **3.5.2. Persamaan *Logistic Regression***

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi logistik. Regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas pada variabel bebasnya karena variabel bebas merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan katagorial (non-metrik) (Ghozali, 2011). Penelitian ini menggunakan regresi logistik karena variabel terikatnya merupakan *dummy*, yaitu RMC yang terpisah dengan Komite Audit di perusahaan atau RMC yang tergabung dengan Komite Audit di perusahaan. Model regresi berikut ini digunakan untuk menguji hubungan antara Komite Manajemen Risiko dan

karakteristik Komite Audit, karakteristik perusahaan, serta kompensasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

$$\text{RMC} = a + b1 \text{ AC Expertise} + b2 \text{ AC Size} + b3 \text{ AC Diligence} + b4 \text{ FINREP} + b5 \text{ Comp} + b6 \text{ Size} + b7 \text{ Levr} + b8 \text{ Segm} + b9 \text{ Rep} + e$$

Keterangan:

a	: Konstanta
b	: Koefisien Regresi
RMC	: <i>Risk Management Committee</i>
ACExp	: Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit
ACSize	: Ukuran Komite Audit
ACDilig	: Frekuensi Rapat Komite Audit
FINREP	: Risiko Pelaporan Keuangan
Comp	: Kompensasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris
Size	: Ukuran perusahaan
Segm	: Kompleksitas Perusahaan
Levr	: <i>Leverage</i>
Rep	: Reputasi Auditor
e	: Error

Langkah analisis pengujian model Regresi logistik adalah sebagai berikut:

### **3.5.2.1. Uji kelayakan Model (*Goodness of fit test*)**

Penilaian model regresi logistik dapat dilihat dari pengujian *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* yang menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai probabilitas (sig.) pada uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak, sedangkan jika nilainya lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol diterima dan berarti model mampu memprediksi 56 nilai observasinya atau dapat dikatakan model diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2011).

H<sub>0</sub> : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

H<sub>A</sub>: Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

### **3.5.2.2. Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)**

Dalam menilai overall fit model dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

#### **3.5.2.2.1. *Cox and Snell's R Square dan Nagelkerke's R square.***

Cox dan Snell's R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R square pada *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan. Untuk mendapatkan koefisien determinasi yang dapat diinterpretasikan seperti nilai R<sup>2</sup> pada *multiple regression*, maka digunakan Nagelkerke R square. Nagelkerke R square merupakan modifikasi dari koefisien Cox and Snell R square untuk memastikan

bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai Cox and Snell R square dengan nilai maksimumnya (Ghozali, 2011).

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol antara satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Dalam regresi logistik menguji  $R^2$  menggunakan uji Cox & Snell dan Nagelkerke (Ghozali, 2011).

#### **3.5.2.2.2 Model Klasifikasi**

Model klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan adanya RMC di suatu perusahaan. Pada kolom dari tabel klasifikasi merupakan dua nilai prediksi dari variabel bebas dalam hal ini yang RMC terpisah (1) dan yang RMC tergabung (0), sedangkan pada baris dalam matriks klasifikasi menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel bebas dimana RMC terpisah (1) dan RMC tergabung (0). Pada model yang sempurna, maka semua kasus akan berada pada diagonal dengan tingkat ketepatan peramalan 100%.

#### **3.5.2.3. Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model terhadap RMC. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *p-value* (*probability value*).

- a. Tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan sebesar 5% (0,05)

- b. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi  $p$ -value. Jika  $p$ -value (signifikan)  $> \alpha$ , maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika  $p$ -value  $< \alpha$ , maka hipotesis alternatif diterima.